

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Dalam prakteknya manajer sebagai pengelola perusahaan tentunya mengetahui lebih banyak informasi internal dan prospek perusahaan diwaktu mendatang dibandingkan pemilik modal atau pemegang saham. Sehingga sebagai pengelola, manajer memiliki kewajiban memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Tetapi dalam hal ini informasi yang disampaikan oleh manajer terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

*Principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent*. *Agent* mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent*. Ketidakseimbangan inilah yang disebut dengan asimetri informasi (Widyaningdyah, 2001).

Manajemen laba muncul sebagai dampak keagenan yang terjadi karena adanya ketidakselarasan kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*), sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent* mendorong *agent* untuk menyajikan informasi yang disesuaikan untuk kepentingan *agent* kepada *principal*, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen. Asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earning management*) dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan.

## **2.1.2 Manajemen Laba**

### **2.1.2.1 Definisi Manajemen Laba**

Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (menurunkan) laba yang dilaporkan saat ini dari suatu unit yang menjadi tanggung jawab manajer tanpa mengkaitkan dengan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang (Fisher dan Rosenzweig, 1995). Upaya perusahaan atau pihak-pihak tertentu untuk merekayasa, memanipulasi informasi, bahkan melakukan tindakan manajemen laba yang dapat menyebabkan laporan keuangan tidak lagi mencerminkan fundamentalnya, karena laporan keuangan seharusnya berfungsi sebagai media komunikasi manajemen dengan pihak eksternal atau antara perusahaan dengan pemangku kepentingan. Menurut Hidayat (2016:238) mendefinisikan manajemen laba adalah intervensi yang dilakukan

dengan sengaja oleh pihak manajemen dalam proses penentuan laba, dan biasanya dilakukan untuk tujuan pribadi.

Manajemen laba berbeda dengan kecurangan. Perbedaan tersebut terletak pada tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi. Manajemen laba merupakan rekayasa pelaporan keuangan dalam batas-batas tertentu yang tidak melanggar standar pelaporan keuangan. Hal ini dilakukan oleh manajemen dengan memanfaatkan wewenangnya dalam memilih metode akuntansi yang diizinkan oleh standar. Manajer memiliki fleksibilitas dalam memilih metode maupun kebijakan akuntansi dari berbagai alternatif metode dan kebijakan yang ada. Metode dan kebijakan yang dipilih berdasarkan preferensi manajer, dimana metode dan kebijakan tersebut dirasa paling menguntungkan pada periode pelaporan.

Manajemen laba biasanya ketika manajer menggunakan kebijakan dalam pelaporan keuangan dan juga ketika menstuktur untuk mengaburkan sebagian *stakeholders* tentang kinerja ekonomis perusahaan atau untuk mempengaruhi kontrak yang bergantung atas angka akuntansi yang dilaporkan (Primanita dan Setiono, 2006). Permasalahan manajemen laba merupakan masalah keagenan yang sering dipicu oleh adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan antara pemilik (pemegang saham) dengan pengelola (manajemen) perusahaan.

Manajemen laba merupakan area yang kontroversial dan penting dalam akuntansi keuangan. Beberapa pihak yang berpendapat bahwa manajemen laba merupakan perilaku yang tidak dapat diterima, mempunyai alasan bahwa manajemen laba berarti suatu pengurangan dalam keandalan informasi laporan

keuangan. Investor mungkin tidak menerima informasi yang cukup akurat mengenai laba untuk mengevaluasi return dan risiko portofolionya (Ashari, 1994) dalam Rahmawati et.al (2006).

#### 2.1.2.2 Pola Manajemen Laba

Menurut Scott (2000) dalam Aji dan Mita (2010), mengidentifikasi adanya empat pola yang dilakukan manajemen untuk melakukan pengelolaan atas laba sebagai berikut:

##### 1. *Taking a Bath*

Pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba di masa datang. Manajemen mencoba mengalihkan *expected future cost* ke masa kini, agar memiliki peluang yang lebih besar mendapatkan labadi masa yang akan datang.

##### 2. *Income Minimization*

Dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat laba yang tinggi sehingga jika laba pada periode mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya. Manajemen mencoba memindahkan beban ke masa kini agar memiliki peluang yang lebih besar mendapatkan laba di masa yang akan datang.

##### 3. *Income Maximization*

Dilakukan pada saat laba menurun dengan cara memindahkan beban ke masa mendatang. Tindakan atas *income maximization* bertujuan untuk melaporkan *netincome* yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih

besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang.

#### 4. *Income Smoothing*

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relative stabil.

### 2.1.2.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba

Menurut Watts dan Zimmerman (dalam Sulistyanto, 2008:44) merumuskan tiga hipotesis teori akuntansi positif (*Positive Accounting Theory*) yang dapat dijadikan dasar pemahaman dalam tindakan manajemen laba adalah :

#### 1. *Bonus Plan Hypothesis*

Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, mengakibatkan manajer perusahaan akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menggeser laba dari periode mendatang ke periode saat ini sehingga dapat menaikkan laba saat ini. Dalam bonus atau kompensasi manajerial, pemilik perusahaan berjanji bahwa manajer akan menerima sejumlah bonus jika kinerja perusahaan mencapai jumlah tertentu. Janji bonus inilah yang merupakan alasan bagi manajer untuk mengelola dan mengatur labanya pada tingkat tertentu sesuai dengan yang diisyaratkan agar dapat menerima bonus.

## 2. *Debt Covenant Hypothesis*

Dalam konteks perjanjian hutang, manajer akan mengelola dan mengatur labanya agar kewajiban hutangnya yang seharusnya diselesaikan pada tahun tertentu dapat ditunda pada tahun berikutnya. Hal ini merupakan upaya manajer untuk mengatur dan mengelola jumlah laba yang merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban hutangnya. Manajer akan melakukan pengelolaan dan pengaturan jumlah laba untuk menunda bebannya pada periode bersangkutan dan akan diselesaikannya pada periode-periode mendatang.

## 3. *Political Cost Hypothesis*

Sejauh ini ada regulasi yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha, misal undang-undang perpajakan, *anti-trust* dan monopoli, dan sebagainya. Perusahaan yang memperoleh laba lebih besar akan ditarik pajak yang lebih besar pula dan perusahaan yang memperoleh laba lebih kecil akan ditarik pajak yang kecil pula. Kondisi inilah manajer untuk mengelola dan mengatur labanya dalam jumlah tertentu agar pajak yang harus dibayarkan menjadi tidak terlalu tinggi, karena manajer sebagai pengelola tentu tidak ingin kewajiban yang harus diselesaikannya terlalu membebaninya.

### **2.1.3 Good Corporate Governance**

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* FCGI mendefinisikan GCG sebagai perangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta

para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan (Utomo, 2015). Menurut Komite Cadbury (1992), corporate governance merupakan suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai kesinambungan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholder (Surya dan Yustivandana, 2008 : 24). Sama halnya dengan Sulityanto (2008) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholdernya*. Untuk itu ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu hak pemegang saham yang harus dipenuhi perusahaan dan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan. Pemegang saham mempunyai hak untuk memperoleh semua informasi secara akurat dan tepat waktu. Sedangkan perusahaan memiliki kewajiban untuk mengungkapkan semua informasi mengenai kinerja perusahaan secara akurat, tepat waktu, dan transparan.

Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip pokok *Good Corporate Governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan

memperhatikan pemangku kepentingan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu :

1. Transparansi (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. Kemandirian (*Independency*), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Adanya sistem *corporate governance* di perusahaan diyakini akan membatasi pengelolaan *earning management*. Karena itu diduga dengan semakin tingginya kualitas audit, semakin tingginya proporsi dewan komisaris independen,

dan adanya komite audit maka akan semakin kecil pengelolaan laba yang oportunis (Siregar, dkk, 2005).

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme *good corporate governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan control atau pengawasan terhadap keputusan. Ada beberapa mekanisme *good corporate governance* yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap manajemen laba, diantaranya adalah kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit. Alasan pemilihan keempat proksi tersebut karena berdasarkan pernyataan Jensen dan Meckling (1976) konflik kepentingan dalam hubungan keagenan dapat diminimumkan melalui mekanisme monitoring secara langsung yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan.

#### 1. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan. Kepemilikan saham manajerial dapat mensejajarkan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer yang menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa untuk meminimalkan konflik keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial di dalam perusahaan. Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen

laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi berbeda akan menghasilkan laba yang berbeda, seperti antara manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal tersebut akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Dengan kata lain, presentase tertentu terhadap kepemilikan saham oleh pihak manajemen, cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba. Dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajer, diharapkan manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan para *principal* karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Menurut penelitian Suaidah dan Utomo (2018) menyatakan bahwa dengan adanya kepemilikan manajemen yang besar diyakini dapat memberikan pengaruh untuk membatasi perilaku manajer dalam melakukan manajemen laba. Hal ini menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.

## 2. Komisaris Independen

Fungsi dewan komisaris adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggungjawab sosial dan mempertimbangkan kepentingan berbagai *stakeholder* perusahaan sebaik memonitor efektivitas pelaksanaan *good corporate governance*. Warsono *et.al* (2010:107) menyatakan bahwa komisaris independen berfungsi sebagai penasehat yang memberikan saran, pendapat dan masukan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Tugas utama dari komisaris independen ini diantaranya menilai dan mengarahkan strategi perusahaan,

kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan, dan rencana usaha; menilai sistem penetapan remunerasi para pejabat yang memegang posisi kunci; memantau dan mengatasi konflik kepentingan; dan memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

Dikutip dari Herwidayatmo (2000), Reiter (1999) menyatakan bahwa komisaris independen dapat membantu memberikan kontinuitas dan objektivitas yang diperlukan bagi suatu perusahaan untuk berkembang dan makmur. Komisaris independen membantu merencanakan strategi jangka panjang perusahaan dan secara berkala melakukan review atas implementasi strategi tersebut. Dengan demikian, hal ini akan memberikan keuntungan bagi perusahaan.

### 3. Komite Audit

Komite audit adalah pihak yang bertanggungjawab melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menciptakan keadilan, transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas. Keempat faktor inilah yang membuat laporan keuangan menjadi lebih berkualitas (Sulistyanto, 2008:156). Tujuan umum dari pembentukan komite audit, antara lain untuk mengembangkan kualitas pelaporan keuangan, memastikan bahwa direksi membuat keputusan berdasarkan kebijakan, praktik dan pengungkapan akuntansi, menelaah ruang lingkup dan hasil dari audit internal dan eksternal, dan mengawasi proses pelaporan keuangan. Menurut Guna et al, 2012 komite audit merupakan suatu komponen yang baru dalam perusahaan yang memiliki peranan sangat vital sebagai sistem pengendalian perusahaan. Komite audit dipilih oleh dewan komisaris untuk mengawasi sistem pengendalian akuntansi perusahaan. Keberadaan komite audit yang efektif mampu membuat

kinerja perusahaan berjalan lebih baik. Sebagai pihak luar perusahaan, investor tidak dapat secara langsung mengamati proses serta kualitas sistem informasi perusahaan, sehingga penilaian investor terhadap kualitas laba perusahaan sangat dipengaruhi oleh persepsinya pada kinerja komite audit. Dengan demikian, keberadaan komite audit diharapkan dapat meminimalisir tindakan manajemen laba (Bukit dan Iskandar, 2009).

#### 2.1.4 Leverage

*Leverage* adalah perbandingan antara total kewajiban dengan total aktiva perusahaan. Rasio ini menunjukkan besarnya besar aktiva yang dimiliki perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Semakin tinggi nilai *leverage* maka risiko yang akan dihadapi investor akan semakin tinggi dan para investor akan meminta keuntungan yang semakin besar. *Leverage* dalam Horne (2007:182) adalah penggunaan biaya tetap dalam usaha untuk meningkatkan profitabilitas. *Leverage* merupakan pedang bermata dua menurut Horne (2007:182) yang mana jika laba perusahaan dapat diperbesar, maka begitu pula dengan kerugiannya. Dengan kata lain, penggunaan *leverage* dalam perusahaan bisa saja meningkatkan laba perusahaan, tetapi bila terjadi sesuatu yang tidak sesuai harapan, maka perusahaan dapat mengalami kerugian yang sama dengan persentase laba yang diharapkan, bahkan mungkin saja lebih besar.

*Leverage* merupakan tingkat sejauh mana sekuritas dengan utang digunakan dalam struktur modal perusahaan. *Leverage* keuangan harus dianalisis untuk melihat sebaik apa dana ditangani. Bauran dana jangka pendek dan jangka panjang yang diperoleh dari luar harus sesuai dengan tujuan dan kebijakan

perusahaan, maka *leverage* keuangan perusahaan dapat memicu pihak manajemen melakukan manajemen laba.

Rasio *leverage* menunjukkan besarnya modal yang berasal dari pinjaman (hutang) yang digunakan untuk membiayai investasi dan operasional perusahaan. Menurut Ma'rif dalam Guna dan Herawati (2010), sumber yang berasal dari hutang akan meningkatkan risiko perusahaan. Oleh karena itu, semakin banyak menggunakan hutang maka *leverage* perusahaan akan besar dan semakin besar pula risiko yang dihadapi perusahaan.

#### **2.1.5 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar dan kecilnya perusahaan dengan berbagai cara, antara lain : total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain (Azlina, 2010). Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007), besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Ketiga variable ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan makasemakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat.

Salah satu tolok ukur yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan akan mempengaruhi struktur pendanaan perusahaan. Perusahaan cenderung akan memerlukan dana yang lebih

besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Tambahan dana tersebut bisa diperoleh dari penerbitan saham baru atau penambahan hutang. Motivasi untuk mendapatkan dana tersebut akan mendorong pihak manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba, sehingga dengan pelaporan laba yang tinggi maka calon investor maupun kreditur akan tertarik untuk menanamkan dananya.

Ukuran perusahaan yang kecil sering dianggap lebih banyak melakukan praktik manajemen laba daripada perusahaan dengan skala besar. Hal ini dikarenakan perusahaan kecil cenderung ingin memperlihatkan kondisi perusahaan yang selalu berkinerja baik agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Sedangkan perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga perusahaan akan melaporkan kondisi keuangan dengan lebih akurat. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total aset perusahaan (Machfoedz, 1994).

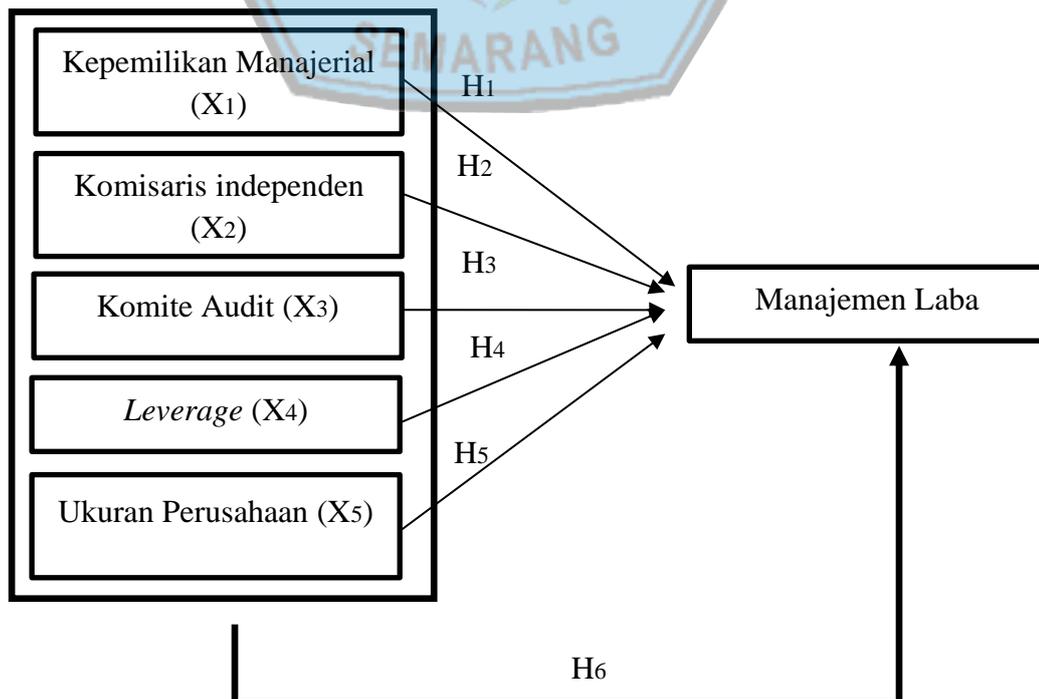
## 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Variabel	Hasil
1.	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> dan Profitabilitas Terhadap Management Laba (Suaidah dan Utomo, 2018)	Variabel bebas : Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Porfitabilitas Variable terikat : Manajemen Laba	Komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Kepemilikan manajerial berpengaruh (-) signifikan terhadap manajemen laba. Profitabilitas berpengaruh (+)

			signifikan terhadap manajemen laba.
2.	Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Manajemen Laba (Astuti dan Nuraina, 2017)	Variabel bebas : Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> Variabel Terikat : Manajemen Laba	Ukuran perusahaan dan <i>Leverage</i> berpengaruh (+) signifikan terhadap manajemen laba.
3.	Pengaruh <i>Earning Power</i> , Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba (Taco dan Ilat, 2016)	Variable bebas : <i>Earning Power</i> , Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Ukuran Perusahaan Variabel terikat : Manajemen Laba	Dewan direksi dan <i>Earning power</i> berpengaruh (+) signifikan terhadap manajemen laba. Ukuran perusahaan, komite audit dan komisaris independen berpengaruh (-) signifikan terhadap manajemen laba.
4.	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> Terhadap Manajemen Laba (Gunawan dkk, 2015)	Variabel bebas : Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> Variabel terikat : Manajemen Laba	Ukuran perusahaan, Profitabilitas dan <i>Leverage</i> berpengaruh (-) signifikan terhadap manajemen laba.
5.	Pengaruh Faktor <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Free Cash Flow</i> , dan <i>Leverage</i> Terhadap Manajemen Laba (Agustia, 2013)	Variabel bebas : Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, <i>Free Cash Flow</i> , <i>Leverage</i> Variabel terikat : Manajeme Laba	Komite audit, Komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap manajemen laba <i>Free cash flow</i> berpengaruh (-) dan signifikan terhadap manajemen laba
6.	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba (Herlambang dan Darsono, 2015)	Variabel bebas : Ukuran Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Ukuran Perusahaan Variabel terikat :	Ukuran dewan komisaris berpengaruh (+) terhadap manajemen laba Komposisi dewan komisaris dan komite

		Manajemen Laba	audit berpengaruh (-) terhadap manajemen laba Ukuran Perusahaan berpengaruh (-) signifikan terhadap manajemen laba
7.	<i>Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Manajemen Laba</i> (Jao dan Pagalung, 2011)	Variabel bebas : Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> Variabel terikat : Manajemen Laba	Kepemilikan Manajerial, Komposisi Dewan Komisaris Independen , Komite Audit, Ukuran Perusahaan berpengaruh(-) terhadap manajemen laba. Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh (+) terhadap manajemen laba. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

### 2.3 Kerangka Pemikiran



## 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara atau proposisi tentatif tentang hubungan dari beberapa variabel yang dapat dipergunakan sebagai tuntunan sementara dalam penelitian untuk menguji kebenarannya.

### 1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba

Kehadiran kepemilikan saham oleh manajer mengakibatkan manajer untuk mengurangi aktivitas manajemen laba atau membuat laporan keuangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena manajer juga bertindak sebagai pemegang saham yang menginginkan informasi yang benar terkait laba perusahaan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suaidah dan Utomo (2018) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kepemilikan manajemen yang besar diyakini dapat memberikan pengaruh untuk membatasi perilaku manajer dalam melakukan manajemen laba.

H1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba

### 2. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba

Keberadaan dewan komisaris independen dimaksud untuk menghindari kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan informasi dan tindakan manajemen yang menyimpang. Maka semakin besar komisaris independen semakin kecil terjadinya manajemen laba. Adanya dewan komisaris independen akan membantu pengawasan terhadap dewan direksi menjadi lebih baik. Dalam menjalankan tugasnya anggota dewan komisaris harus bersikap independen, sehingga harus

terdapat anggota dari luar perusahaan yang independen (Farida, 2012). Jika independensi dewan komisaris lemah, maka ada kecenderungan terjadinya *moral hazard* oleh para direktur perusahaan untuk memenuhi kepentingannya. Penelitian terdahulu Herlambang dan Darsono (2015) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan semakin tinggi persentase jumlah anggota komisaris independen disuatu perusahaan dapat menekan terjadinya manajemen laba dan sangat berperan dalam mengurangi tindakan manajemen laba di perusahaan.

H2 : Komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba

### 3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba

Komite audit dipilih oleh dewan komisaris untuk mengawasi sistem pengendalian akuntansi perusahaan. Keberadaan komite audit yang efektif mampu membuat kinerja perusahaan berjalan lebih baik. Kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada peran komite audit dalam mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan (Suaryana, 2005). Komite audit perlu secara aktif melakukan pekerjaan dengan mengambil bagian dalam pertemuan komite audit (Lina *et al*, 2009). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jao dan Pagalung (2011) menyatakan bahwa jumlah pertemuan komite audit mempunyai pengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan semakin banyak jumlah pertemuan komite audit maka akan menurunkan tindakan manajemen laba.

H3 : Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba

#### 4. Pengaruh *Leverage* Terhadap Manajemen Laba

*Leverage* merupakan rasio antara total kewajiban dengan total aset. Semakin besar rasio *leverage*, berarti semakin tinggi nilai utang perusahaan. Dengan demikian, perusahaan yang mempunyai rasio *leverage* yang tinggi, berarti proporsi hutangnya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi aktivasnya akancenderung melakukan manipulasi dalam bentuk manajemen laba dengan tujuan untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang. Penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Nuraina (2017), menyatakan *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Perusahaan yang mempunyai rasio *leverage* yang tinggi berarti proporsi hutangnya lebih tinggi dibandingkan proporsi aktivasnya akan cenderung melakukan manipulasi dalam bentuk manajemen laba.

H4 : *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba

#### 5. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba

Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan investasi dalam perusahaan tersebut semakin banyak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Taco dan Ilat (2016), menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin kecil tindak manajemen labanya.

H5 : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba

6. Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi manajemen laba.

Dengan uraian diatas dapat dirumuskan sebagai berikut :

H6 : Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba

